



LAPORAN KINERJA Triwulan II

**PANGKALAN PSDKP BITUNG
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2023**



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2023. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) TW II Tahun 2023 merupakan bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitan dengan terselenggaranya *good governance* di lingkup UPT Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan gambaran terhadap capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2023. Dalam Laporan Kinerja ini juga menjabarkan langkah-langkah tindaklanjut dalam rangka perbaikan capaian kinerja ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Saran dan masukan yang membangun dalam rangka perbaikan laporan ke depan sangat kami harapkan, dan tidak lupa disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif, sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan disampaikan kepada pimpinan.

Bitung, 10 Juli 2023
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Bitung



Harlym Raya Maharbhakti, S.Pi, M.Si.
NIP. 19800314 200312 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) TW II tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, untuk tahun 2023 pada Pangkalan PSDKP Bitung terdapat 8 Sasaran Kegiatan dan 24 Indikator Kinerja. Hasil pengukuran pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 109,19 % dari 24 Indikator Kinerja yang dimiliki oleh Pangkalan PSDKP Bitung, 11 Indikator Kinerja telah dilakukan pengukuran pada Triwulan II tahun 2023.

Pencapaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2023 dilaksanakan melalui 5 Kegiatan Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yaitu: Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan (2350), Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan (2351), Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (2352), Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (2353), dan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (2355). Pagu alokasi anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2023 sebesar Rp47,879,725,000 dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebesar Rp18,038,481,188 atau 37.67%. Pada tahun 2023 terdapat beberapa kegiatan Pangkalan PSDKP Bitung yang dilaksanakan untuk mendukung Program Nasional dan Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu pada kegiatan Operasi Armada Kapal Pengawas dan Speed Boat serta kegiatan Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko bidang kelautan dan perikanan, pembangunan sarana dan prasarana pengawasan SDKP.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	l
DAFTAR ISI	l
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Isu Strategis	1
1.4 Tugas dan Fungsi	2
1.5 Sistematika Penyajian	5
BAB I PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2019-2024	7
2.2 Rencana Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Tahun 2023	8
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	10
2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	13
BAB I AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Tahun 2023	14
3.2 Analisis Capaian Kinerja	16
3.3 Akuntabilitas Anggaran	28
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	29
4.2 Rekomendasi	29
4.3 Rencana Tindak Lanjut	29

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2023	10
Tabel 2	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023	14
Tabel 3	Indeks Kinerja Kapal Pengawas TW Tahun 2023	17
Tabel 4	Indeks Kinerja Speed Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2022	18
Tabel 5	Rincian Capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2022	19
Tabel 6	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO TW II 2023	25
Tabel 7	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI TW II 2023	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung	4
Gambar 2	Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung	5
Gambar 3	Capaian Kinerja TW II Tahun 2023	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) TW II tahun 2023 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Pangkalan Pengawas SDKP Bitung untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*good governance*”.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) TW II tahun 2023 ini adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada TW II tahun 2023 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dari capaian kinerja tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasinya.

1.3. ISU STRATEGIS

Isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan khususnya terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, yaitu:

1. Isu strategis pengawasan sumber daya perikanan, meliputi
 - a) Maraknya pencurian ikan oleh Kapal Perikanan Asing (KIA) dengan berbagai modus operandi;
 - b) Pemanfaatan sumber perikanan oleh Kapal Ikan Indonesia (KI), antara lain: penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan (buis dan bom ikan), penggunaan

- ABK asing, kelengkapan ijin operasi dan penangkapan ikan diluar kewenangan penerbit izin;
- c) Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove;
 - d) Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut;
 - e) Penggunaan Obat Ikan, Kimia dan Bahan biologi (OIKB) dalam pembudidayaan ikan;
 - f) Belum memiliki PKKPR terkait pipa pasok air laut;
 - g) Pelaksanaan ekspor dan impor hasil perikanan Indonesia harus sesuai dengan ketentuan internasional dan regional;
 - h) Unit pengolah ikan yang telah beroperasi belum terbit izin SKP, belum memiliki fasilitas IPAL serta dokumen PKPLH; dan
 - i) Penggunaan bahan berbahaya seperti formalin, borax dan bahan berbahaya lainnya dalam produk hasil perikanan.
2. Isu strategis pengawasan sumber daya kelautan, meliputi:
- a) Pemanfaatan ruang di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan RTR, RZ KAW, dan RZ KSNT;
 - b) Pemanfaatan ruang di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki perizinan PKKRL;
 - c) Kerusakan ekosistem terumbu karang akibat penambangan karang hias tanpa izin, penggunaan alat tangkap yang merusak karang seperti bom, racun, bius, dan stroom, serta aktivitas wisata bahari
 - d) Pencemaran perairan pesisir akibat buangan limbah industri perikanan dan non perikanan serta rumah tangga;
 - e) Sedimentasi di perairan pesisir akibat kegiatan pertambangan; dan
 - f) Penambangan pasir laut tanpa izin.

Selain isu strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas, SDM juga menjadi isu strategis yang menjadi perhatian bagi Pangkalan PSDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan rentang kendali yang luas meliputi seluruh Pulau Sulawesi, dukungan SDM Pengawas Perikanan yang terbatas menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkup Satwas dan Wilker Pangkalan Pengawas SDKP Bitung perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP di tahun 2023.

1.4. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber

daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b) pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
- d) pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
- e) pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f) pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) pelaksanaan urusan ketatausahaan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Pangkalan membawahi Kepala Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini:

a) Kepala Pangkalan

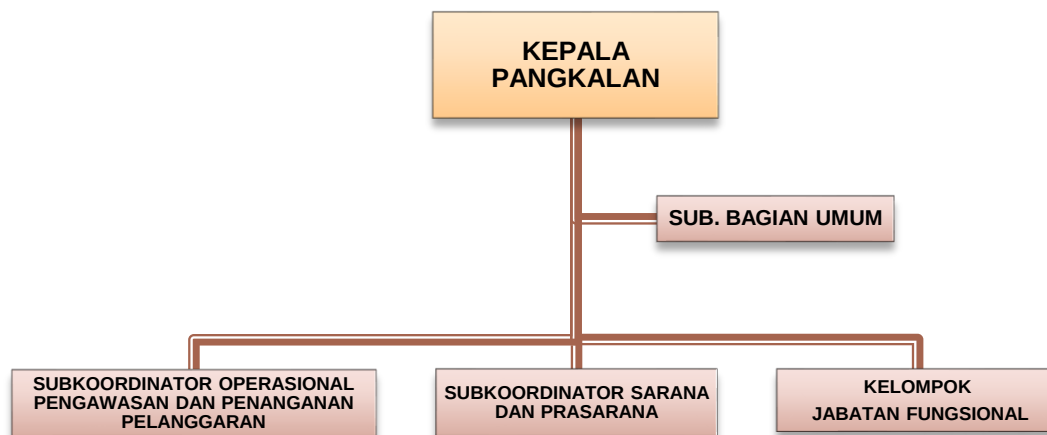
Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Kepala Subbagian Umum

Melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

c) Kelompok Jabatan Fungsional

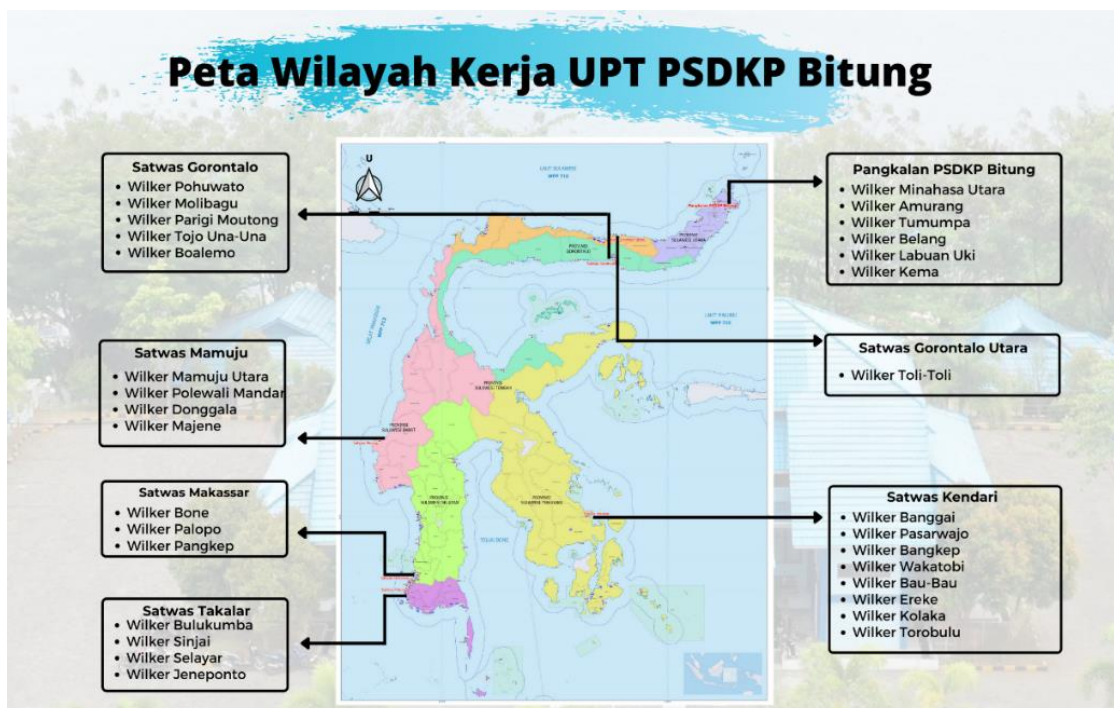
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung

Kepala Pangkalan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengenai hasil pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, dan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT PSDKP maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Di lingkungan UPT PSDKP dibentuk Satuan Pengawasan yang merupakan unit organisasi nonstruktural di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Satuan Pengawasan SDKP Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja masing-masing.



Gambar 2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung

Berdasarkan SK Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017, untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara efektif, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dibantu oleh 6 Satuan Pengawasan SDKP 31 Wilayah Kerja PSDKP, dengan rincian :

- a) **Pangkalan PSDKP Bitung**, meliputi: Wilker PSDKP Amurang, Wilker PSDKP Belang, Wilker PSDKP Labuan Uki, Wilker PSDKP Kema, Wilker PSDKP Tumumpa, dan Wilker PSDKP Sitaro.
- b) **Satwas SDKP Gorontalo**, meliputi: Wilker PSDKP Molibago, Wilker PSDKP Parigi Moutong, Wilker PSDKP Tojo Una-una, Wilker PSDKP Boalemo, dan Wilker PSDKP Pohuwato.
- c) **Satwas SDKP Kendari**, meliputi: Wilker PSDKP Banggai, Wilker PSDKP Banggai Kep. Dan Banggai Laut, Wilker PSDKP Bau-bau, Wilker PSDKP Ereke, Wilker PSDKP Kolaka, Wilker PSDKP Pasar Wajo, Wilker PSDKP Torobulu, dan Wilker PSDKP Wakatobi.
- d) **Satwas SDKP Gorontalo Utara**, meliputi: Wilker PSDKP Toli-toli.
- e) **Satwas SDKP Makassar**, meliputi: Wilker PSDKP Bone, Wilker PSDKP Palopo, dan Wilker PSDKP Pangkajene Kepulauan.
- f) **Satwas SDKP Takalar**, meliputi: Wilker PSDKP Bulukumba, Wilker PSDKP Jeneponto, Wilker PSDKP Selayar, dan Wilker PSDKP Sinjai.
- g) **Satwas SDKP Mamuju**, meliputi: Wilker PSDKP Donggala, Wilker PSDKP Majene, Wilker PSDKP Mamuju Utara, dan Wilker PSDKP PolewaliMandar.

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) tahun 2023 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung di susun sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKj, tugas dan fungsi organisasi serta isu strategis organisasi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung;
2. BAB II Perencanaan Kinerja, pada bab ini menjelaskan tentang rencana strategis Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung untuk periode 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2023;
3. BAB III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada tahun 2023; dan
4. BAB IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada tahun 2023 dan rekomendasi perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

BAB

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2020 – 2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis KKP sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2020 – 2024. Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Ditjen PSDKP

1. Visi

“Perairan Indonesia bebas *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab”

2. Misi

- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- b. Meningkatkan pencegahan terjadinya pelanggaran pemanfaatan SDKP melalui pengawasan partisipatif.
- c. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan.

3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi Direktorat Jenderal PSDKP sekaligus penterjemahan tujuan di dalam Renstra KKP 2020-2024 maka tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal PSDKP akan sangat berkaitan dengan salah satu aspek pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu aspek kedaulatan (*sovereignty*) dengan fokus pada: “Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

4. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020 – 2024 melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan *logical model* yang utamanya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas dan Kementerian Keuangan serta menggunakan pendekatan *balanced scorecard (BSC)* yang digunakan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dan pengukuran kinerja.

5. Peta Strategi dan Sasaran Kegiatan

Peta strategi merupakan sejumlah sasaran kegiatan yang terangkai dalam hubungan sebab akibat dan mengacu pada visi dan misi organisasi. Peta strategi memberikan gambaran visual dari strategi organisasi sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi. Peta strategi memiliki beberapa perspektif, yaitu suatu cara

pandang untuk mengelola kinerja organisasi. Perspektif yang digunakan dalam BSC KKP yaitu:

a) *Perspektif Stakeholder*

Perspektif ini mencakup Sasaran Kegiatan yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *stakeholder*. Yang dimaksud dengan *stakeholder* (pemangku kepentingan) adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi.

b) *Perspektif Customer*

Perspektif ini mencakup Sasaran Kegiatan yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *Customer*. *Customer* (pengguna layanan) adalah pihak eksternal yang terkait langsung dengan pelayanan organisasi.

c) *Perspektif Internal Process*

Perspektif ini mencakup Sasaran Kegiatan yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi, untuk memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (value chain).

d) *Perspektif Learning and Growth*

Perspektif ini mencakup Sasaran Kegiatan yang berupa kondisi sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Sasaran Kegiatan merupakan deskripsi lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan sebagai suatu prioritas yang ingin dimiliki, dijalankan, dan dicapai organisasi pada periode tertentu. Sasaran Kegiatan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan penjabaran visi dan misi Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024, yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan tertentu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan target kinerja tahun 2023 yang telah ditentukan sebelumnya.

2.2. Rencana Kerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2023

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2023 yaitu: Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, dengan lingkup Kegiatan, meliputi:

1. Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan;
 - a) Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
 - b) Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam
 - c) Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan
 - d) Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

- a) Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Kelautan dan Perikanan
- b) Penanganan Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
- 3. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
 - a) Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya
 - b) Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya;
 - c) Unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya.
 - d) Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya
 - e) Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya
 - f) Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak
- 4. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
 - a) Pengawasan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan
- 5. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - a) Layanan BMN
 - b) Layanan Hubungan Masyarakat
 - c) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
 - d) Layanan Umum
 - e) Layanan Data dan Informasi
 - f) Layanan Perkantoran
 - g) Layanan Sarana Internal
 - h) Layanan Manajemen SDM
 - i) Layanan Perencanaan dan Penganggaran
 - j) Layanan Pemantauan dan Evaluasi
 - k) Layanan Manajemen Keuangan
 - l) Layanan Reformasi Kinerja

2.3. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Pengelolaan kinerja di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan pemenuhan

amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Ditjen PSDKP, juga ditujukan untuk menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi; membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*countinuous improvement*); dan Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. Target kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2023 sebagaimana tabel Perjanjian Kinerja dibawah ini:

Tabel 1.Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PEMBINAAN POKMASWAS				
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK1.1.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80
KEGIATAN 2. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK2.1	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK2.1.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	87,6
		ISK2.1.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	87,6
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan	ISK3.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan	100
KEGIATAN 4. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	ISK4.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan	100
KEGIATAN 5. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN				
SK5.1	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK5.1.1	Persentase penyelesaian pembangunan speedboat pengawas	100
		ISK5.1.2	Persentase penyelesaian pembangunan pos pengawasan Satwas SDKP Makassar	100
		ISK5.1.3	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP	100
KEGIATAN 6. PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK6.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	ISK6.1.1	Persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	80
KEGIATAN 7. PENANGANAN TINDAK PIDANA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK7.1	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	ISK7.1.1	Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	93
KEGIATAN 8. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK8.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP	80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Bitung	
		ISK8.1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	80
		ISK8.1.3 Nilai WBK Pangkalan PSDKP Bitung	75
		ISK8.1.4 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	100
		ISK8.1.5 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	78
		ISK8.1.6 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	90
		ISK8.1.7 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	75
		ISK8.1.8 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21
		ISK8.1.9 Jumlah inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1
		ISK8.1.10 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	92
		ISK8.1.11 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	77,5
		ISK8.1.12 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	77,5
		ISK8.1.13 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	89
		ISK8.1.14 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	82

2.4. Pengukuran Capaian Kinerja TW II Tahun 2023

Berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam melakukan pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan:

1. Melakukan perhitungan data mentah (*Raw Data*)

Perhitungan data mentah perhitungan atas objek yang diukur untuk memperoleh data realisasi IKU sesuai formula dalam manual IKU.

2. Menghitung realisasi IKU, Realisasi IKU merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual IKU, dengan memperhitungkan periode perhitungan

IKU, dan pola perhitungan capaian.

3. Memasukan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (*kinerjaku.kkp.go.id*).
4. Melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput *valid*, *reliable*, dan obyektif.
5. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI *gaming*).
6. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.

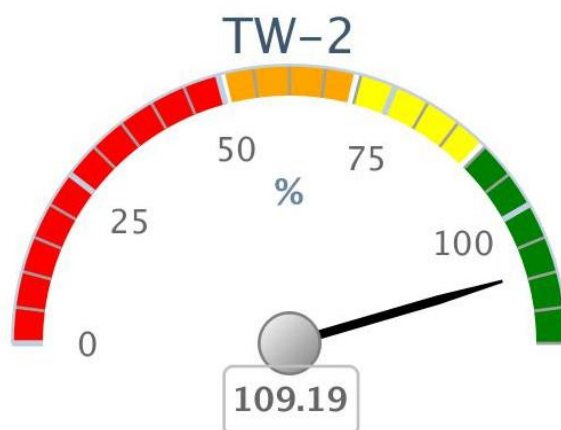
Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan implementasi Aplikasi Kinerjaku (<https://kinerjaku.kkp.go.id/>) yang merupakan aplikasi berbasis informasi teknologi yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung pengelolaan kinerja.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan II Tahun 2023 pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) adalah 109,19.



Gambar 3. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Capaian kinerja Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan II tahun 2023 sebesar 109,19% apabila dibandingkan dengan nilai capaian kinerja Triwulan II tahun 2022 yakni 108,89% maka terdapat kenaikan sebesar 0,3%. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya perubahan formulasi penghitungan capaian kinerja dalam manual iku serta adanya beberapa Indikator Kinerja yang capaiannya istimewa pada Triwulan II tahun 2023.

Pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target	Target	Capaian	%
				2023	JUNI	JUNI	
S.01	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif						100.00
1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas(indeks)	Indeks	Maximize	80	50	50	100.00
S.02	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif						112.55
2	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	Indeks	Maximize	87,6	87,6	100	114.16
3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	Indeks	Maximize	87,6	87,6	97,94	111.80
S.03	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan						
4	Persentase penyelesaian pembangunan speedboat pengawasan SDKP	%	Maximize	100	0		

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target	Target	Capaian	%
				2023	JUNI	JUNI	
5	Persentase penyelesaian pembangunan pos Pengawasan Satwas SDKP Makassar	%	Maximize	100	0		
6	Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP	%	Maximize	100	0		
S.04	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan						100.00
7	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan	%	Maximize	100	100	100	100.00
S.05	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan						100.00
8	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan	%	Maximize	100	100	100	100.00
S.06	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas						120.00
9	Persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	%	Maximize	80	60	100	120.00
S.07	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas						120.00
10	Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	%	Maximize	93	50	100	120.00
S.08	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP						111.75
11	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Indeks	Maximize	80	80	89,15	111.44
12	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Indeks	Maximize	80	80	95,81	119.76
13	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	75	0		
14	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	100	100	100	100.00
15	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Indeks	Maximize	78	71	77,41	109.03
16	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	90	0		
17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	Maximize	75	100	75	120.00

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Target	Target	Capaian	%
				2023	JUNI	JUNI	
18	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	NILAI	Maximize	21	0		
19	Jumlah inovasi yang dihasilkan	Inovasi	Maximize	1	0		
20	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	92	92	92,59	100.64
21	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	77,5	0		
22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	Maximize	77,5	0		
23	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	89	82	93,68	114.24
24	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	NILAI	Maximize	82	0		

(sumber: kinerjaku.kkp.go.id tanggal 10 Juli 2023)

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan II tahun 2023, telah dilakukan pengukuran indikator kinerja terhadap 14 (empat belas) indikator kinerja dari 24 (dua puluh empat) indikator kinerja Pangkalan PSDKP Bitung. Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja dengan nilai capaian 110 – 120% (**Istimewa**) dan 6 (enam) indikator kinerja dengan nilai capaian 90 - <110 (**baik**).

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis terhadap pencapaian kinerja di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dilakukan pada setiap Sasaran Kegiatan di masing-masing Indikator Kinerja, bertujuan untuk menjelaskan secara rinci jenis kegiatan yang mendukung tercapainya atau tidak tercapainya suatu kegiatan, disertai dengan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja, sekaligus mencoba membandingkan capaian kinerja Triwulan II tahun 2023 dengan capaian TW II tahun sebelumnya.

Sasaran Kegiatan 1:

Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif

Kegiatan pembinaan Pokmaswas pada tahun 2023 memiliki target 7 (tujuh) kelompok mencakup seluruh Pokmaswas diseluruh wilayah kerja pangkalan PSDKP Bitung.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp216.920.000 sampai dengan Triwulan II 2023 telah dilakukan realisasi kegiatan maupun anggaran dalam rangka kegiatan pembinaan Pokmaswas untuk 1 (satu) kegiatan Pembinaan POKMASWAS dengan realisasi anggaran sebesar Rp57.619.786 dengan persentase realisasi sebesar 26,41%

IKU1. INDEKS KUALITAS PEMBINAAN POKMASWAS

Target kinerja IKU Indeks Kinerja Pembinaan POKMASWAS lingkup Pangkalan PSDKP Bitung TW II tahun 2023 adalah 50 tercapai 50 dengan persentase capaian kinerja 100%.

Target Kelompok POKMASWAS pada tahun 2023 adalah 7 Kelompok dan mengalami penambahan jumlah kelompok POKMASWAS dibanding dengan tahun 2022 yaitu 4 Kelompok POKMASWAS. Pencapaian IKU ini adalah pada TW II tahun 2023 di telah dilakukan pelaksanaan Pembinaan 1 kelompok POKMASWAS dari target semester sebanyak 2 kelompok POKMASWAS

Tabel 3. Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas TW II Tahun 2023

No	Nama Kegiatan	SM1		Bobot	%	Perhitungan SM1	Keterangan/Data Dukung
		Target	Realisasi				
1	a. Rencana Kerja Kegiatan Pembinaan POKMASWAS	4	2	20	100	1000	a. Rencana Kerja Kegiatan Pembinaan POKMASWAS
	Target per TW (50%)	2	1				
	Jadwal pelaksanaan kegiatan (50%)	2	1				
2	b. Pendataan Keaktifan POKMASWAS	4	2	30	100	1500	b. Pendataan Keaktifan POKMASWAS
	Form Keaktifan Pokmaswas (50%)	2	1				
	Database Kelompok Pokmaswas (50%)	2	1				
3	c. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan	4	2	50	100	2500	c. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan
	Laporan Pelaksanaan kegiatan pembinaan (50%)	2	1				
	Dokumentasi (50%)	2	1				
Indeks						5000	
Nilai IKU (a+b+c)/100						50	

Sasaran Kegiatan 2:

Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif

Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif terdiri 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: 1) Indeks kinerja operasi kapal pengawas; 2) Indeks kinerja operasi speedboat pengawas.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp10.631.129.000 dan realisasi TW II tahun 2023 Rp 8.546.934.615 persentase realisasi anggaran sebesar 80,40%.

IKU2 INDEKS KINERJA OPERASI KAPAL PENGAWAS

Target kinerja IKU Indeks Kinerja Kapal Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

TW II tahun 2023 adalah 87,6 dan realisasinya tercapai 100 dengan persentase capaian kinerja 114,16%.

Target hari operasi pada tahun 2023 adalah 90 HO mengalami penambahan jumlah hari operasi dibanding tahun 2022 yaitu 53 HO. Faktor keberhasilan dalam pencapaian IKU ini adalah pada TW II tahun 2023 di telah dilakukan pelaksanaan operasi kapal pengawas KP. HIU 02 dan KP. Hiu 05 yang mana masing-masing kapal telah terealisasi 60 hari operasi dan seluruh komponen pembentuk dalam pencapaian indeks kinerja Kapal pengawas telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditentukan.

Tabel 11. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas TW II Tahun 2023

No	Satler	Kapal Pengawas	Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)			Pemeriksaan Kelautan (30%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)			Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)			Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)			Dukungan Kegiatan SAR (40%)			Tindak Lanjut Target Operasi (15%)			Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (30%)			Pemutusan Rumpun Ilegal (30%)			Dukungan Operasi Bersama (40%)			Dukungan Operasi Lainnya (5%)			Total Nilai Indeks	Nilai per Satler
			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II			TW II				
			Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai		
1	Pangkalan PSDKP Bitung	KP. HIU 02	60	62	70	0	0	30	40	0,143365	0,200980	40	0	0	60	0	0	40	15	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0	40	5	100,00	100,00			
		KP. HIU 05	60	83	70	0	0	30	40	0,143365	0,156507	40	0	0	60	0	0	40	15	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0	40	5	100,00				

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 10.631.129.000 dan realisasi TW II tahun 2023 adalah Rp 8.546.934.615 realisasi anggaran sebesar 80,40%.

IKU3 INDEKS KINERJA SPEED BOAT PENGAWAS LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Target IKU Indeks Kinerja Speedboat Pengawas pada tahun 2023 adalah 97,94 dan realisasi kinerja IKU Indeks Kinerja Speedboat Pengawas tahun 2022 tercapai 95,91. capaian pada tahun 2023 dengan persentase capaian kinerja 111,80%. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target IKU ini TW II tahun 2023 adalah semua komponen yang menjadi target operasi dapat terealisasi sesuai dengan yang telah ditentukan. Dari ke enam belas unit speedboat yang dimiliki oleh Pangkalan PSDKP Bitung 14 unit speedboat telah melaksanakan giat operasi dan 2 diantaranya belum beroperasi, hal tersebut dikarenakan 1 unit speedboat masih dalam proses pembangunan sedangkan 1 unit rubberboat dalam kondisi rusak berat dan sedang dalam proses perbaikan.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 2.094.760.000 dan realisasi TW II tahun 2023 adalah Rp 973.239.350 persentase realisasi anggaran adalah 46,46%.

Tabel 4. Indeks Kinerja Operasi Speed Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung TW II Tahun 2023

Lokasi UPT	Nama Speedboat	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)			Pemeriksaan Kelautan (50%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)			Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)			Intercept Indikasi Pelanggaran (60%)			Dukungan Kegiatan SAR (40%)			Tindak Lanjut Target Operasi (15%)			Penyitaan Alat Tangkap Tertayang (40%)			Pemutusan Rumpun Ilegal (40%)			Dukungan Operasi Bersama (20%)			Dukungan Operasi Lainnya (5%)			Total Nilai Indeks	Nilai per Satker
		TW I			TW I			TW I 40%			TW I 40%			TW I			TW I			TW I 15%			TW I			TW I			TW I			TW I				
		Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai		
Pangkalan PSDKP Bitung	ALBACORE 001	5	21	50%	0	0	50%	40	0.0000415	0.0000392	40	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5.00	100.00							
	NAPOLION 030	5	7	50%	0	0	50%	40	0.0000415	0.0000119	40	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5.00	100.00							
	NAPOLION 031	5	15	50%	0	0	50%	40	0.0000415	0.0000726	40	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5.00	100.00							
	NAPOLION 056	5	12	50%	0	0	50%	40	0.0000415	0.0000569	40	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5.00	100.00							
	DOLPHIN 003	5	10	50%	0	0	50%	40	0.0000415	0.0000643	40	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5.00	100.00							
	DOLPHIN 019	5	22	50%	0	0	50%	40	0.0000415	0.0001327	40	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5.00	100.00							
	DOLPHIN 026	5	13	50%	0	0	50%	40	0.0000415	0.0000456	40	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5.00	100.00							
	SEARIDER 06	10	7	35%	0	0	50%	34	0.0000830	0.0001099	40	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5.00	94.00							87.94
	RB SELAYAR	5	10	50%	0	0	50%	40	0.0000415	0.0000456	40	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5.00	100.00							
	RB PANGKEP	10	25	50%	0	0	50%	40	0.0000830	0.0001767	37	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5.00	97.00							
	RB PALOPO	5	9	50%	0	0	50%	40	0.0000415	0.0000415	40	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5.00	100.00							
	RB TAKALAR	5	12	50%	0	0	50%	40	0.0000415	0.0000436	40	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5.00	100.00							
	RB MOROWALI (EKS. KENDARI)	5	6	50%	0	0	50%	40	0.0000830	0.0000232	15	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5.00	76.00							
	RB WAKATOB	0	0	50%	0	0	50%	40	0.0000000	0.0000000	40	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5.00	100.00							
	RB BANGGAI	15	15	50%	0	0	50%	40	0.0001244	0.0001556	40	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5.00	100.00							
	RIJU BIRU	0	0	50%	0	0	50%	40	0.0000000	0.0000000	40	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5.00	100.00							
	TOTAL	90	183	50%	0	0	50%	40	0.0007081	0.0010318	38	0	0	60%	0	0	40%	15	0	0	40%	0	0	40%	0	0	20%	5.00	100.00							

Sasaran Kegiatan 3:

Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

Sasaran Kegiatan Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan terdiri dari 3 (tiga) IKU yaitu Persentase penyelesaian pembangunan speedboat pengawas, IKU Persentase penyelesaian pembangunan pos pengawasan Satwas SDKP Makassar dan IKU Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp10.220.740.000 dan realisasi TW II tahun 2023 Rp2.656.543.703 persentase realisasi anggaran sebesar 26%.

IKU4 PERSENTASE PENYELESAIAN PEMBANGUNAN SPEEDBOAT PENGAWAS

Belum dilakukan pengukuran kinerja pada IKU Indeks Persentase penyelesaian pembangunan speedboat pengawas, IKU ini akan dilakukan pengukurannya pada Triwulan IV tahun 2023.

IKU5 PERSENTASE PENYELESAIAN PEMBANGUNAN POS PENGAWASAN SATWAS SDKP MAKASSAR

Belum dilakukan pengukuran kinerja pada IKU Indeks Persentase penyelesaian pembangunan pos pengawasan Satwas SDKP Makassar, IKU ini akan dilakukan pengukurannya pada Triwulan IV tahun 2023.

IKU6 PERSENTASE PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN SDKP

Belum dilakukan pengukuran kinerja pada IKU Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP, IKU ini akan dilakukan pengukurannya pada Triwulan IV tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 4:

Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan

Sasaran kegiatan 4 terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan terdiri dari 1 (satu) Indikator Utama yaitu Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan.

IKU7 PERSENTASE PENYELESAIAN PEMERIKSAAAN PELAKU USAHA KELAUTAN

Target IKU ini pada Triwulan II tahun 2023 adalah 100% dengan capaian pada TW II 2023 adalah 100% sehingga untuk IKU ini dapat tercapai sesuai dengan target, faktor

keberhasilan pencapaian IKU ini adalah seluruh kegiatan pengawasan pelaku usaha kelautan telah mempedomani kriteria dan kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan yang tercantum didalam Manual IKU.

Perhitungan realisasi persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan dapat dikatakan tercapai 100% jika dapat memenuhi tahapan pemeriksaan yakni dilengkapi dengan surat tugas dari pimpinan, adanya Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pengawas perikanan/Polsus PWP3K dan pelaku usaha serta adanya laporan kegiatan pengawasan. Capaian ini merupakan hasil agregasi capaian 6 (enam) kegiatan pengawasan, meliputi:

- Pengawasan pengelolaan jenis ikan yang dilindungi
- Pengawasan pengelolaan jasa kelautan
- Pengawasan pengelolaan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Pengawasan pencemaran perikanan dan non perikanan
- Pengawasan pengelolaan kawasan konservasi
- Pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak

Tabel 6. Rincian realisasi capaian Kinerja IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung TW II Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	TARGET RIKSA	CAPAIAN RIKSA	PERSENTASE PENYELESAIAN PEMERIKSAAN
1.	Pengawasan pengelolaan jenis ikan yang dilindungi	2	2	100
2.	Pengawasan pengelolaan jasa kelautan	2	2	100
3.	Pengawasan pengelolaan ruang laut	20	20	100
4.	Pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	8	8	100
5.	Pengawasan pencemaran perikanan dan non perikanan	1	1	100
6.	Pengawasan pengelolaan kawasan konservasi	0	0	0
7.	Pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak	21	21	100
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung		54	54	100

Rincian informasi capaian kinerja untuk masing-masing Sub indikator kinerja di tahun 2022, sebagai berikut:

1. Unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya

Kegiatan pengawasan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan II

tahun 2023 pengawasan terhadap pelaku usaha wisata bahari. telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) pelaku usaha produk dan jasa kelautan dengan capaian penyelesaian pemeriksaan tercapai 100%. Data pelaku usaha yang diawasi adalah :

1. PT. Duta Citra Wisata atau Bastianos Diver Resort Bunaken beralamat di Pulau Bunaken, Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara
2. PT. Pandu Harapan Nusa atau Grand Luley Hotel beralamat di Jl. Raya Tongkaina, Desa Tongkaina, Kec. Bunaken, Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pemeriksaan unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2023 sebesar Rp107.844.000 terealisasi sebesar Rp28.430.00 dengan persentase penyerapan anggaran 26,36%.

2. Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya

Pemeriksaan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya Triwulan II tahun 2023 sebanyak 6 pelaku usaha dengan persentase capaian penyelesaian pemeriksaan 100%. Data pelaku usaha yang diawasi adalah sebagai berikut:

1. PT. TJ Silfanus beralamat di Kel. Malalayang I, Kec. Malalayang, Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara.
2. PT. Gema Kreasi Perdana beralamat di Desa Sukarela Jaya, Kec. Wawoni Tenggara, Kab. Konawe Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara.
3. PT. Ramadhan Moramo Raya beralamat Desa Wawatu, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara
4. PT. Citra Khusuma Sultra Desa Wawatu, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara
5. PT. Hoffmen Energi Perkasa Desa Wawatu, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara
6. PT. Arsa Mega Pratama Desa Tanjung Tiram, Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan, Prov. Sulawesi Tenggara

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini di Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2023 sebesar Rp182.200.000 terealisasi sebesar Rp 122.923.528 dengan persentase penyerapan anggaran 67,47 %.

3. Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak

Pengawasan *destructive fishing* dilaksanakan berdasarkan wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bitung dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan muatan kapal yang terindikasi terjadinya kegiatan *destructive fishing* serta menindaklanjuti aduan masyarakat terkait adanya aktifitas penggunaan bom dan bius ikan.

Pada Triwulan II tahun 2023 Pangkalan PSDKP Bitung telah melakukan pemeriksaan terhadap 27 pelaku usaha, dengan persentase penyelesaian pemeriksaan 100%.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan *destructive fishing* pada tahun 2023 sebesar Rp 175.500.000 dan realisasi Triwulan II tahun 2023 adalah Rp 55.861.079. Persentase realisasi dari kegiatan ini adalah 31,83 %.

Sasaran Kegiatan 5:

Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan

Target Sasaran Kegiatan 5 Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan di dukung dengan IKU 8 Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, target capaian IKU pada tahun 2023 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan dengan capaian tahun 2022 capaian nya tetap tidak mengalami kenaikan maupun penurunan capaian.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp 700.000.000 dan realisasi TW II tahun 2023 adalah Rp 406.262.107 persentase realisasi anggaran adalah 58,04 %.

IKU8 PRESENTASE PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN PELAKU USAHA PERIKANAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Capaian kinerja IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan tahun 2023 dari target 100% tercapai 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Jika dibandingkan dengan dengan capaian TW II tahun 2022 capaiannya tetap tidak mengalami kenaikan maupun penurunan capaian. Faktor yang mendukung keberhasilan tercapainya target IKU 2 ini adalah Pengawas Perikanan telah tertib adminitrasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam manual IKU selanjutnya dalam pelaporan kegiatan telah didukung oleh sistem pelaporan oleh direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang memadai.

Perhitungan capaian persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan dapat dikatakan tercapai 100% jika dapat memenuhi tahapan pemeriksaan yakni dilengkapi dengan surat pemberitahuan ke pelaku usaha, surat tugas dari pimpinan, adanya Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pengawas perikanan dan pelaku usaha serta adanya laporan kegiatan pengawasan yang diInput ke sistem pelaporan Direktorat PPSPD. Dalam proses pelaksanaan kegiatannya mengacu pada Perdirjen PSDKP Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko bidang perikanan terdapat dua mekanisme pengawasan yaitu pengawasan berbasis OSS dan pengawasan incidental.

Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II tahun 2023 di Pangkalan PSDKP Bitung berdasarkan kode proyek melalui OSS adalah 24 kode proyek, data pelaku usaha tersebut sebagai berikut:

1. CV. BERKAH LAUT PERKASA Kode proyek 202201-1110-0443-8047-177 berlokasi di Jl. BTN Tinggede Permai Blok FF. No 2, Desa/Kelurahan Tinggede, Kecamatan Marawola

2. PT. MITRA KARTIKA SEJATI Kode proyek 201912-2323-0636-9535-805 berlokasi di JL. KIMA RAYA I KAV. D - 1 B, KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR
3. PT DUNIA MARINE PRODUCTS Kode proyek 202103-1909-3104-4959-269 berlokasi di Jl. KIMA 3 / K- 4B Daya Biringkanaya
4. PT BRILIANT OCEAN FISH Kode proyek 202001-0800-3418-9551-685 berlokasi di LINGKUNGAN 1 RT.5 BITUNG TIMUR
5. PT LAUT BIRU SEAFOOD Kode proyek 202108-2014-5143-8746-301 berlokasi di Jl. Lumba-Lumba Lingkungan IV, RT 001 RW 004, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara
6. PT LAUT BIRU SEAFOOD Kode proyek 202111-0812-1416-4527-113 berlokasi di Jl. Lumba-Lumba Lingkungan IV, RT 001 RW 004, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara
7. PT LAUT BIRU SEAFOOD Kode proyek 202111-0813-4134-3234-985 berlokasi di Jl. Lumba-Lumba Lingkungan IV, RT 001 RW 004, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara
8. PT LAUT BIRU SEAFOOD Kode proyek 202111-0907-5545-4111-660 berlokasi di Jl. Lumba-Lumba Lingkungan IV, RT 001 RW 004, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara
9. PT LAUT BIRU SEAFOOD Kode proyek 202111-0908-3742-2237-745 berlokasi di Jl. Lumba-Lumba Lingkungan IV, RT 001 RW 004, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.
10. PT LAUTAN SAKTI JAYA Kode proyek 201912-3115-0806-3319-704 berlokasi di Jl. M. Umirtun, Desa/Kelurahan Talia, Kec. Abeli
11. PT LAUTAN SAKTI Kode proyek JAYA 202106-0215-0630-7089-362 berlokasi di Jl. M. Umirtun, Desa/Kelurahan Talia, Kec. Abeli
12. PT SHING SHENG FA OCEAN Kode proyek 202109-1511-5132-9392-396 berlokasi di Lingkungan III, Desa/Kelurahan Paceda, Kec. Madidir
13. PT KAYA SAMUDRA GLOBAL Kode proyek 201912-2914-4537-7916-312 berlokasi di Jl. Ir. Sutami. Komplek Pelitagro B.6, Kelurahan Parang Loe, Kec. Tamalanrea Jl. Tol Lama No 3 Kelurahan Parang Loe, Kec. Tamalanrea
14. PT KENNDI FISHERIES INDONESIA Kode proyek 202201-3111-5309-3874-004 berlokasi di Jl. Tol Lama No 3 Kelurahan Parang Loe, Kec. Tamalanrea
15. PT KENNDI FISHERIES INDONESIA Kode proyek 202201-3111-2145-7588-978 berlokasi di Jl. Tol Lama No 3 Kelurahan Parang Loe, Kec. Tamalanrea
16. PT KENNDI FISHERIES INDONESIA Kode proyek 202202-0321-2723-6735-300 berlokasi di Jl. Tol Lama No 3 Kelurahan Parang Loe, Kec. Tamalanrea
17. PT KENNDI FISHERIES INDONESIA Kode proyek 202202-0321-3108-7717-415 berlokasi di Jl. Tol Lama No 3 Kelurahan Parang Loe, Kec. Tamalanrea
18. PT RD PACIFIC INTERNATIONAL Kode proyek 201912-3115-1036-5493-710 berlokasi di Jl.

Raya Madidir, Desa/Kelurahan Paceda, Kec. Madidir

19. PT LAUTAN SAKTI JAYA Kode proyek 202106-0408-4843-4263-453 berlokasi di Jl. Kima No. 19 Kav. DD 3 A
20. PT LAUTAN SAKTI JAYA Kode proyek 202107-0212-5325-3092-850 berlokasi di Jl. Kima No. 19 Kav. DD 3 A
21. PT NUTRINDO FRESFOOD INTERNASIONAL Kode proyek 202105-0315-5000-2768-324 berlokasi di
22. PT YIN JING INTERNASIONAL Kode proyek 202004-0108-5116-5622-087 berlokasi di Jl. KIMA 3 / K- S13, Daya, Biringkanaya
23. PT YIN JING INTERNASIONAL Kode proyek 201912-3116-5847-7436-170 berlokasi di Jl. KIMA 3 / K- S13, Daya, Biringkanaya
24. PT YIN JING INTERNASIONAL Kode proyek 202009-0711-0755-1859-219 berlokasi di Jl. KIMA 3 / K- S13, Daya, Biringkanaya

Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang telah dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2023 di Pangkalan PSDKP Bitung berdasarkan kode proyek melalui mekanisme pengawasan insidental telah dilakukan terhadap 4 pelaku usaha, data pelaku usaha tersebut sebagai berikut:

- 1) PT. MITRA KARTIKA SEJATI Nomor Induk Berusaha 8120018201843 berlokasi di JL. KIMA RAYA I KAV. D - 1 B, KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR
- 2) PT. MITRA KARTIKA SEJATI Nomor Induk Berusaha 8120018201843 berlokasi di JL. KIMA RAYA I KAV. D - 1 B, KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR
- 3) PT DUNIA MARINE PRODUCTS Nomor Induk Berusaha 8120210190089 berlokasi di Jl. KIMA 3 / K- 4B Daya Biringkanaya
- 4) PT. Vaname Kasoloang Sejahtera Nomor Induk Berusaha 9120001582117 berlokasi di Dusun Kasoloang, Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu
- 5) PT. Tumpaan Makuri Mandiri
- 6) PT. Pillar Persada Parigi
- 7) PT NUTRINDO FRESFOOD INTERNASIONAL
- 8) PT. Perikanan Indonesia
- 9) PT. Sari Tuna Makmur
- 10) PT. Sari Tuna Makmur
- 11) PT. Sinar Pure Food International
- 12) PT. Perikanan Indonesia Cabang Gorontalo
- 13) PT. Sinar Bahari Lautan Timur Indonesia
- 14) PT. Sinar Bahari Lautan Timur Indonesia
- 15) PT. Parigi Aquakultura Prima
- 16) PT. Maria Southsea Pearls Indonesia

- 17) Kampung Budidaya Desa Patuhu, Randangan , Pohuwato
- 18) PT. Multipar Sapta Tama
- 19) PT. Manakarra Sakti Abadi
- 20) PT. Randomayang Tambak Lestari
- 21) PT. Nuansa Cipta Magello
- 22) PT. Usaha Central Jaya Sakti
- 23) PT. Asnur Anton Jaya
- 24) PT. Dua Lima Satu Dua
- 25) CV. Karya Murni
- 26) PT. Sentosa Sumber Galesong

Sasaran Kegiatan 6:

Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Tuntas

Sasaran Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan, target IKU ini adalah 50%.

IKU9 PERSENTASE PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Target IKU pada tahun 2023 adalah 5 perkara, sampai dengan Triwulan II tahun 2023 Pangkalan PSDKP Bitung telah selesai mengenakan sanksi administrasi terhadap 16 pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, baik bidang kelautan maupun perikanan. Sehingga secara kuantitas capaian penyelesaian telah melebihi dari 120%. Sampai dengan Triwulan II tahun 2023 Pangkalan PSDKP Bitung telah mengenakan sanksi administrasi terhadap 16 pelaku usaha baik bidang kelautan maupun perikanan, dengan rincian 9 pelaku usaha dikenakan denda administrasi, 4 pelaku usaha dikenakan surat peringatan I, dan 3 pelaku usaha dikenakan paksaan pemerintah.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000 dan realisasi TW II tahun 2023 adalah Rp. 69.739.964 dengan realisasi serapan anggaran 69,74 %

Sasaran Kegiatan 7 :

Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan

Sasaraan Kegiatan 7 Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas di dukung dengan satu indikator kinerja, yaitu: 1. IKU Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan. Pada tahun 2023 di

Pangkalan PSDKP Bitung terdapat 3 (tiga) target penyelesaian penyidikan bidang kelautan dan perikanan.

IKU10 PERSENTASE PENYELESAIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Target IKU pada tahun 2023 adalah 3 perkara, sampai dengan Triwulan II tahun 2023 Pangkalan PSDKP Bitung telah menangani 14 perkara bidang kelautan dan perikanan. Tiga perkara telah selesai sampai dengan tahap I dan dua perkara baru sampai dengan tahap II. target IKU ini pada Triwulan II adalah 50% sedangkan capaiannya adalah 100%. Sehingga persentase realisasi IKU ini adalah 120%. Kelima perkara yang ditangani merupakan tindak pidana perikanan yaitu penggunaan bom ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp 256.200.000 dan realisasi TW II tahun 2023 adalah Rp. 227.578.100 dengan realisasi serapan anggaran 88,83%.

Sasaran Kegiatan 8:

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen. PSDKP

Sasaran Kegiatan 8 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP di dukung dengan 14 empat belas indikator kinerja.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp20.646.152.000 dan TW II tahun 2023 adalah Rp 10.379.067.631 persentase realisasi anggaran sebesar 57, %.

IKU11 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN SLO SURAT LAIK OPERASI KAPAL PERIKANAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Indeks Kepuasan Masyarakat IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik pengawas perikanan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO di Pangkalan PSDKP Bitung dilaksanakan setiap triwulan. Berdasarkan hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat pada Triwulan II tahun 2023 capaian indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO adalah 89,15 dari target 80 sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja IKM pengguna layanan SLO pada TW II tahun 2023 adalah 111,44%. Jika dibandingkan dengan capaian IKM pada Triwulan II tahun 2022 nilai capaiannya 89,65 dan persentase capaiannya 112,06%, mengalami penurunan senilai 0,50 poin, hal tersebut menunjukkan adanya Penurunan kualitas dalam pelayanan yang diberikan terhadap pengguna jasa layanan SLO di Pangkalan PSDKP Bitung pada tahun 2023. Faktor pendukung

keberhasilan dalam pencapaian IKU ini adalah Pangkalan PSDKP Bitung gencar melakukan sosialisasi terhadap para pelaku usaha terkait peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, serta berupaya memberikan pelayanan prima terhadap pengguna jasa dan adanya upaya perbaikan terhadap fasilitas pelayanan publik yang memadai dalam hal ini pemindahan ruang pelayanan dari kompleks PPS Bitung ke kantor utama Pangkalan PSDKP Bitung.

Tabel 6. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO TW II tahun 2023

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	Keterangan	NRR	IKM
U1	Persyaratan	3.524	sangat baik	0.391	88.095
U2	Prosedur	3.563	sangat baik	0.396	90.079
U3	Waktu Pelayanan	3.524	sangat baik	0.391	88.095
U4	Biaya/Tarif	3.619	sangat baik	0.402	91.270
U5	Produk Layanan	3.587	sangat baik	0.398	89.683
U6	Kompetensi Pelaksana	3.587	sangat baik	0.398	88.095
U7	Perilaku Pelaksana	3.651	sangat baik	0.405	91.270
U8	Sarana dan Prasarana	3.563	sangat baik	0.396	90.476
U9	Pengaduan Masyarakat	3.508	sangat baik	0.389	87.698
Rata - Rata Semua Unsur				3.566	
Keterangan : - U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur Pelayanan - NRR = Nilai rata-rata - IKR = Indeks Kepuasan Responden - *) = Jumlah NRR IKR tertimbang - **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25 NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111 IKR TERHADAP RSS : Mutu Pelayanan :					
					89.15

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan hasil survey kepada masyarakat yang menjadi pengguna layanan SLO di Pangkalan PSDKP Bitung dengan jumlah responden sebanyak 83 responden, diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat SKM : 3,643 dengan nilai Indeks sebesar 91,06 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT MEMUASKAN, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 81,26 – 100,00.

IKU12 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN LVHPI LEMBAR VERIFIKASI HASIL PENANGKAPAN IKAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI TW II tahun 2023 adalah 93,10 dari target 80, sehingga capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat penggunaan layanan LVHPI adalah 116,38%. Jika dibandingkan dengan nilai IKM pada TW II tahun 2022 yaitu 92,96 menunjukkan adanya peningkatan 0,14 poin. hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas dalam pelayanan yang diberikan terhadap pengguna jasa layanan LVHPI. Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian IKU ini adalah Pangkalan PSDKP Bitung gencar melakukan sosialisasi terhadap para pelaku usaha terkait peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, serta berupaya memberikan pelayanan prima terhadap pengguna jasa dan adanya upaya perbaikan terhadap fasilitas pelayanan publik yang memadai dalam hal ini pemindahan ruang pelayanan dari kompleks PPS Bitung ke kantor utama Pangkalan PSDKP Bitung.

Tabel 7. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI TW II tahun 2023

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	Keterangan	NRR	IKM
U1	Persyaratan	3.750	sangat baik	0.416	93.750
U2	Prosedur	3.900	sangat baik	0.433	98.750
U3	Waktu Pelayanan	3.850	sangat baik	0.427	96.250
U4	Biaya/Tarif	3.825	sangat baik	0.425	97.500
U5	Produk Layanan	3.750	sangat baik	0.416	93.750
U6	Kompetensi Pelaksana	3.825	sangat baik	0.425	95.000
U7	Perilaku Pelaksana	3.850	sangat baik	0.427	96.250
U8	Sarana dan Prasarana	3.875	sangat baik	0.430	96.250
U9	Pengaduan Masyarakat	3.900	sangat baik	0.433	97.500
Rata - Rata Semua Unsur				3.832	

Keterangan :	
- U1 s.d. U9	= Unsur-Unsur Pelayanan
- NRR	= Nilai rata-rata
- IKR	= Indeks Kepuasan Responden
- *)	= Jumlah NRR IKR tertimbang
- **)	= Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR Per Unsur	= Jumlah nilai per unsur dibagi
	Jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang per unsur	= NRR per unsur x 0,111

IKR TERHADAP RSS :	95.81
---------------------------	--------------

Mutu Pelayanan :	
A (Sangat Memuaskan)	: 81,26 - 100,00
B (Memuaskan)	: 62,51 - 81,25
C (Kurang Memuaskan)	: 43,76 - 62,50
D (Tidak Memuaskan)	: 25,00 - 43,75

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan hasil survey kepada masyarakat yang menjadi pengguna layanan LVHPI di Pangkalan PSDKP Bitung dengan jumlah responden sebanyak 82 responden, diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat SKM : 3,832 dengan nilai Indeks sebesar 95,81 dengan mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT MEMUASKAN, karena berada dalam interval nilai konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 81,26 – 100,00.

IKU13 NILAI WBK LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada Triwulan II tahun 2023 belum dilakukan terhadap IKU ini, Pengukuran IKU dilakukan pada TW IV tahun 2023.

IKU14 PERSENTASE PELAKSANAAN KEGIATAN BERBASIS MANAJEMEN RISIKO LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Target IKU ini pada TW II tahun 2023 adalah 100% dan capaiannya adalah 100%. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah dilaksanakan oleh seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Pangkalan PSDKP Bitung dan pengendalian Manajemen Risiko melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan oleh sekretariat Ditjen PSDKP. Dari 17 rencana pengendalian risiko terealisasi 17 sehingga capainnya 100%.

IKU15 INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Hasil pengukuran capaian IKU IP ASN pada TW II adalah 77,41 dari target nilai TW II adalah 71 sehingga persentase capaian IKU ini adalah 109,03%. Penyebab tidak tercapainya nilai IP ASN pada Pangkalan PSDKP Bitung pada TW II tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah adanya mutasi pegawai dari daerah ke Pangkalan PSDKP Bitung pada tahun 2023 yang menyebabkan tidak terpenuhinya beberapa unsur penilaian IP ASN pada masing pegawai, salah satunya adalah nilai SKP pada tahun sebelumnya yang tidak bisa diakumulasikan dengan nilai SKP pada tahun berjalan dan beberapa pegawai belum mengikuti diklat teknis

sesuai dengan jabatannya.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU ini sebesar Rp. 149.360.000,- dan realisasi anggaran TW II tahun 2023 adalah Rp. 13.555.867 atau 10,93%. Pada Triwulan II tahun 2023 dilakukan terhadap IKU ini, Pengukuran IKU dilakukan pada TW IV tahun 2023.

IKU16 NILAI REKONSILIASI KINERJA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada Triwulan II tahun 2023 belum dilakukan penilaian terhadap IKU ini. Pengukuran IKU dilakukan pada TW IV tahun 2023.

IKU17 PERSENTASE JUMLAH REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Target IKU pada Triwulan II tahun 2023 adalah 75%, dan capaian pada TW II tahun 2023 adalah 75% dengan persentase capaian 100%. IKU ini pada TW II tidak terdapat rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh Pangkalan PSDKP Bitung, sehingga berdasarkan Manual IKU maka dapat diklaim capaiannya sesuai dengan target yaitu 75%.

IKU18 NILAI IMPLEMENTASI PROGRAM BUDAYA KERJA

Pada Triwulan II tahun 2023 belum dilakukan penilaian terhadap IKU ini. Pengukuran IKU dilakukan pada TW IV tahun 2023.

IKU19 JUMLAH INOVASI YANG DIHASILKAN

Pada Triwulan II tahun 2023 belum dilakukan terhadap IKU ini, Pengukuran IKU dilakukan pada TW IV tahun 2023.

IKU20 PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Hasil capaian IKU ini pada TW II tahun 2023 adalah 100% dari target 2023 di Pangkalan PSDKP Bitung sebesar 92% persentase capaian IKU ini adalah 108,70%.

IKU21 TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada Triwulan II tahun 2023 belum dilakukan penilaian terhadap IKU ini. Pengukuran IKU dilakukan pada TW IV tahun 2023.

IKU22 TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada Triwulan II tahun 2023 belum dilakukan penilaian terhadap IKU ini. Pengukuran IKU dilakukan pada TW IV tahun 2023.

IKU23 NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN IKPA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada Triwulan II tahun 2023 belum dilakukan penilaian terhadap IKU ini, Pengukuran

IKU dilakukan pada TW IV tahun 2023.

IKU24 NILAI KINERJA ANGGARAN NKA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pada Triwulan II tahun 2023 belum dilakukan terhadap IKU ini, Pengukuran IKU dilakukan pada TW IV tahun 2023.

3.3. Akuntabilitas Anggaran

Pagu anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2023 adalah Rp47,879,725,000 realisasi anggaran sampai dengan TW II tahun 2023 adalah Rp18,038,481,188 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 37.67%.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP sebagai pemberi amanah dengan Kepala Pangkalan PSDKP Bitung sebagai penerima amanah sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja 8 Sasaran Kegiatan dan 24 Indikator Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada tahun 2023 pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan kinerjaku.kkp.go.id adalah 109,19. Semua indikator kinerja dapat tercapai sesuai target.

4.2. Rekomendasi

Dalam rangka perbaikan pencapaian indikator kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada tahun 2023, perlu dilakukan peningkatan terhadap capaian kinerja yang capaiannya belum maksimal, guna mencapai target pelaksanaan kegiatan berdasarkan target yang tercantum dalam perjanjian kinerja maupun target output dalam RKA/KL.

4.3. Rencana Tindaklanjut

Melakukan perencanaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja pada tahun 2023 secara terarah dan terukur, dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dan pelaksanaan percepatan kegiatan guna menyesuaikan dengan rencana aksi dan target pada setiap triwulannya.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAR www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Harlym Raya Maharbhakti**

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

Adin Nurawaluddin

Harlym Raya Maharbhakti

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PEMBINAAN POKMASWAS				
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK1.1.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80
KEGIATAN 2. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK2.1	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK2.1.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	87,6
		ISK2.1.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	87,6
KEGIATAN 3. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN				
SK3.1	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK3.1.1	Persentase penyelesaian pembangunan speedboat pengawas	100
		ISK3.1.2	Persentase penyelesaian pembangunan pos pengawasan Satwas SDKP Makassar	100
		ISK3.1.3	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP	100
KEGIATAN 4. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK4.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan	ISK4.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan	100
KEGIATAN 5. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK5.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	ISK5.1.1	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan	100
KEGIATAN 6. PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK6.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	ISK6.1.1	Persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	80
KEGIATAN 7. PENANGANAN TINDAK PIDANA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK7.1	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	ISK7.1.1	Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	93

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 8. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	ISK8.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	80
		ISK8.1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	80
		ISK8.1.3	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Bitung	75
		ISK8.1.4	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	100
		ISK8.1.5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	78
		ISK8.1.6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	90
		ISK8.1.7	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	75
		ISK8.1.8	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21
		ISK8.1.9	Jumlah inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1
		ISK8.1.10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	92
		ISK8.1.11	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	77,5
		ISK8.1.12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	77,5
		ISK8.1.13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	89
		ISK8.1.14	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	82

Data Anggaran

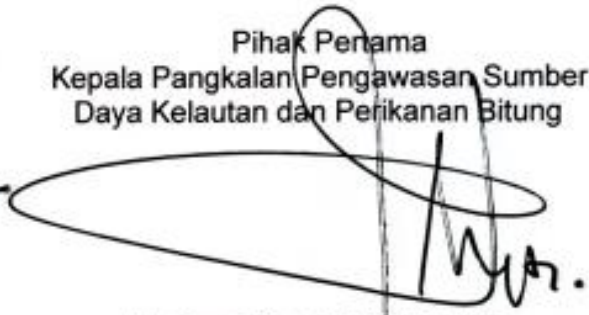
NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	1.553.744.000
Kegiatan 2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.802.000.000
Kegiatan 3	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	23.471.629.000
Kegiatan 4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	406.200.000
Kegiatan 5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	20.646.152.000
Total Anggaran		47.879.725.000

Jakarta, 18 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Bitung


Adin Nurawaluddin


Harlym Raya Maharbhakti